

# SOSIALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SILAWAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU

Aryanto Kode Bora<sup>1</sup>, Agustina Elfita Kolo<sup>2</sup>, Maria Anisia Duan<sup>3</sup>, Kornalia Naihetis<sup>4</sup>,  
Stefanus Don Rade<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Katolik Widya Mandira

<sup>5</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira  
*e-mail*: stefanusdonrade@unwira.ac.id

## Abstrak

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Adapun metode yang dilakukan adalah sosialisasi berupa pemaparan materi dan dilanjutkan diskusi tanya jawab. Pemberdayaan masyarakat kampung merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung. Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat peran menetapkan dan merelisasikan program-program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat; peran membina dan meningkatkan perekonomian desa; peran memperjuangkan aspirasi pembangunan dari masyarakat kepada pemerintah; dan peran mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran perlindungan masyarakat dilihat dari peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, dan peran membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Adapun hasil pelaksanaan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa aparat kampung dan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti sehingga diharapkan dapat memberikan perubahan terkait proses percepatan pembangunan dengan memaksimalkan peran aparat dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di kampung.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Pemerintah Desa, Kesejahteraan

## Abstract

The role of the village government in improving community welfare in Silawan Village, East Tasifeto District, Belu Regency. The method used was socialization in the form of material presentation and followed by a question and answer discussion. Village community empowerment is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities, and assistance in accordance with the essence of the problem and the priority needs of the village community. The role in improving the welfare of the community is the role of determining and realizing development programs according to the needs of the community; the role of fostering and improving the village economy; the role of fighting for development aspirations from the community to the government; and the role of supporting the implementation of development programs in the village carried out by the government. The role in improving community welfare through the role of community protection is seen from the role in fostering village community life, and the role of fostering peace and order in the village community. As for the results of the implementation of the socialization of community service regarding the role of village government in improving community welfare, it can be concluded that the village officials and the community are very enthusiastic in participating so that it is hoped that it can provide changes related to the process of accelerating development by maximizing the role of officials and increasing community participation in the implementation of development in the village.

**Keywords:** Socialization, Village Government, Welfare

## PENDAHULUAN

Kampung atau sebutan lain dari Desa dan Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kampung beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Olehnya itu dibutuhkan aparat kampung yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Kehadiran aparat kampung yang juga disertai tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya(Rade, S.D ; Wohon, Ernesta Uba; Lobo 2023). Dengan demikian peran aparat kampung dalam memberdayakan masyarakatnya menjadi penting dan menjadi harapan seluruh masyarakat kampung untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pemberdayaan masyarakat kampung merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung. Pemberdayaan Masyarakat kampung diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama, oleh karena itu aparat kampung harus memaksimalkan perannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya(Rade, S.D. 2022). Pelaksanaan peran aparat pemerintah kampung hendaknya dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab yang diemban sebagai fasilitator maupun pelayan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat oleh aparat kampung bukan hanya diperlukan koordinasi yang baik antara aparat dengan masyarakat namun juga tingkat pengetahuan dan keahlian aparat kampung dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang di Kampung(Iek, Mesak; Hutajulu, Halomoan; Antoh, Agustina Ester; Timisela 2023).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa(Allang, Achmad; Kunu, Andi Bustamin; Mubarak 2023).

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan kedudukan dan kewenangan desa tersebut maka pemerintah desa diharapkan dapat berperan dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara teoritis terdapat sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa(Sufiarina et al. 2021). Wasistiono mengemukakan ada tiga peran penting pemerintah dalam hubungan dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan. Peran pelayanan umum, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya(Handini et al. 2022).

Peran pembangunan, yaitu peran pemerintah melaksanakan program-program pembangunan di desa baik yang program yang datang dari pemerintah maupun program pemerintah desa itu sendiri. Peran perlindungan masyarakat, yaitu peran pemerintah menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Desa Silawan Kecamatan Tasi Feto Timur Kabupaten Belu sebagian besar adalah merupakan petani kecil, buruh tani, dan nelayan kecil yang tingkat kesejahteraannya masih rendah, sehingga diperlukan peran yang lebih besar dari pemerintah desa untuk melaksanakan upaya dan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan masyarakat(Warman, Joharsah, and Muhlizar 2022). Dengan melakukan ke tiga peran pemerintah desa tersebut dengan baik maka diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peran pelayanan publik sangat penting untuk dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dari prasarvei yang dilakukan nampaknya peran pelayanan

publik dari pemerintah Desa Silawan belum maksimal dilakukan. Hal itu dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat desa atas pelayanan pelayanan yang diterima dari pemerintah desa seperti kelambatan dalam memberi pelayanan, ketidak-keepatan waktu penyelesaian pelayanan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (Masriani, Yulies Tiena; Suryoutomo 2023).

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah desa diharapkan dapat melakukan peran pembangunan, yaitu membuat dan melaksanakan program-program pembangunan desa yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, kepentingan masyarakat desa. Namun kenyataan menunjukkan pemerintah desa dalam merencanakan program-program pembangunan desa seringkali kurang atau tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi cenderung mengikuti keinginan dan kepentingan sebagian kecil masyarakat, atau keinginan dan kepentingan pemerintah desa itu sendiri, atau juga keinginan pemerintah atasan (Hasima, Rahman; Zuliarti, Wa Ode; Widyastuti, Endah; Rizky 2023). Akibatnya, program-program pembangunan desa yang dilaksanakan kurang memberi manfaat bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan (Eliana, Suryani, and Naib 2022). Dari prasurvei menunjukkan kecenderungan seperti ini masih terjadi di Desa Silawan. Peran perlindungan masyarakat juga penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena aspek ini berkenaan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di desa. Pemerintah desa harus dapat berperan dalam membina kehidupan masyarakat desa, serta membina ketenteraman dan ketertiban umum di desa. Namun sering kali peran perlindungan masyarakat ini kurang diperhatikan oleh pemerintah desa.

Adapun manfaat dari pengabdian masyarakat ini kedepan adalah untuk memberikan gambaran pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah desa sehingga optimalisasi fungsi dan peran aparat dapat terlaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat dapat meningkat. Oleh karena itu diperlukan suatu pengabdian kepada masyarakat di Desa Silawan mengenai sosialisasi peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan dan cita-cita bersama untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

## METODE

Tahap pertama merupakan tahap perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap perencanaan kegiatan meliputi survey lokasi, persiapan materi sosialisasi di Kantor Desa Silawan, alasan memilih Kantor Desa Silawan karna ingin memperkenalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Desa Silawan selama satu hari. Pemateri pada kegiatan sosialisasi adalah mahasiswa ilmu pemerintahan beserta dosen pendamping lapangan dan peserta pada kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat dan aparat desa silawan yang dilaksanakan pukul 09.00-09.50 WITA bertempat di ruangan aulah kantor desa silawan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak terlalu lama selain memberikan materi kami juga memberikan pengertian kepada masyarakat agar selalu berpartisipasi bersama pemerintah dalam membangun kesejahteraan bersama untuk menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlebih dahulu diawali dengan Tim PKM melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Silawan untuk memastikan kesediaan pihak pemerintah desa dan masyarakat untuk dilakukan pengabdian di daerahnya. Selanjutnya kami melakukan pra pengabdian dengan melakukan wawancara dengan pihak Pemerintah Kampung terkait permasalahan yang dihadapi di Kampung. Berdasarkan pra pengabdian team di Desa Silawan dalam rangka menggali permasalahan yang dihadapi didesa tersebut, terdapat beberapa permasalahan yakni pertama, kurangnya pemberdayaan terhadap sumberdaya yang ada antara lain susahny pemenuhan kebutuhan pangan khususnya lauk pauk yaitu sayuran dan ikan dimana pemenuhannya disupply oleh pedagang yang berasal dari ibu kota kabupaten yang tentunya dengan harga yang sangat mahal, sementara sumberdaya lahan di Desa Silawan sangat tersedia disetiap rumah tangga yang dapat digunakan untuk membudidayakan sayuran maupun ikan (kolam). Kedua, kurangnya pengetahuan dan keahlian aparat khususnya terhadap pelaporan keuangan maupun administrasi di Desa Silawan, hal ini tentu menjadi kelemahan dalam pelaporan kegiatan bantuan dana desa dan kegiatan lainnya. Ketiga, sudah dibentuk Badan Usaha Milik

Desa (Bumdes) yang bergerak dalam bidang perdagangan barang kebutuhan pokok, namun masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan bisnis tersebut.

Langkah selanjutnya team pengabdian menyusun materi sosialisasi berdasarkan permasalahan yang timbul dibagi dalam tiga materi yakni peran aparat kampung, sumberdaya manusia dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budi daya tanaman sayuran. Berbicara mengenai peran aparat pemerintah kampung, hal ini tidak lepas dari kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintah menuntut adanya aparatur kampung yang kompeten dari segi pengetahuan, keterampilan, serta visioner terlebih lagi dapat merangsang partisipasi aktif dari masyarakat sehingga benar-benar masyarakat terberdayakan. Kemampuan aparat pemerintah yang mumpuni dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan, kesadaran bekerjasama, kesejahteraan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi selain pemaparan materi diikuti juga dengan tanya jawab/diskusi. Dari hasil diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan diantaranya diperlukannya pelatihan laporan keuangan maupun administrasi kepada desa yang akan ditindaklanjuti, diadakannya Desa Silawan sebagai desa binaan dalam pemanfaatan lahan pekarangan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta penggunaan struktur organisasi pemerintah kampung yang baru berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015.

Hasil yang dicapai dicantumkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Yang Dicapai

No	Materi yang disampaikan	Target	Hasil yang dicapai
1	Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat Merasa Puas Dengan Adanya Pelayanan Yang Diberikan Oleh Pemerintah
2	Pembentukan Masyarakat Sejahterah	Masyarakat Dan Pemerintah Setempat	Hasil yang memuaskan dari pemerintah untuk masyarakat



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

**SIMPULAN**

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh aparat kampung perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pemberdayaan, aparat senantiasa mengupdate pengetahuan dan skillnya dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan pendampingandan partisipasi masyarakat diharapkan meningkat dengan adanya koordinasi dengan aparat kampung mengenai kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pelaksanaan sosialisasi ini disambut suka cita oleh Masyarakat Desa Silawan yakni dengan semangat hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dengan adanya sosialisasi ini, Pemerintah

Kampung dan Masyarakat dapat mengetahui peran Aparat kampung dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga aparat kampung bisa menjalankan perannya dan untuk masyarakat semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta meningkatnya partisipasinya, untuk itu diharapkan kedepannya pemerintah kampung dan masyarakat bisa sama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat di Desa Silawan melalui aspek pemberdayaan.

### SARAN

Bertolak dari kesimpulan hasil Kuliah Kerja Nyata, maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu peran pelayanan pemerintah secara umum, masih perlu ditingkatkan dalam hal kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kualitas pelayanan dan juga peran pemerintah masih perlu ditingkatkan dalam hal penetapan program pembangunan desa yang lebih sesuai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa; pembinaan dan peningkatan, memperjuangkan aspirasi kesejahteraan dan kepentingan dari masyarakat; serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran perlindungan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor, LPPM Universitas Katolik Widya Mandira dan Pemerintah Desa Silawan yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Silawan. Terima kasih kepada yang telah memperkenalkan penulis untuk memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa Silawan dan terima kasih juga kepada seluruh peserta KKN Desa Silawan dan dosen pendamping lapangan yang selalu kompak dalam menjalankan kegiatan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Allang, Achmad; Kunu, Andi Bustamin; Mubarak, Muh. Ayyub. 2023. "Pendaftaran Tanah Sebagai Sarana Pengamanan Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sambulu Gana* 2(1):23–30.
- Eliana, Eliana, Reni Suryani, And Naib Naib. 2022. "Legalitas Kepemilikan Tanah." *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):114–22.
- Handini, Ratika, Salsabila Anjani, Nabilla Siregar, And Vicha Kartika Mayshara. 2022. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang." *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(9):3208–17. Doi: 10.31604/Jpm.V5i9.3208-3217.
- Hasima, Rahman; Zuliarti, Wa Ode; Widyastuti, Endah; Rizky, Ali; Isnayanti. 2023. "Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Amal Ilmiah* 4(2):229–35.
- Iek, Mesak; Hutajulu, Halomoan; Antoh, Agustina Ester; Timisela, Stephani Inagama. 2023. "Sosialisasi Pengakuan Tanah Adat Keluarga Faitri Sebagai Sistem Nilai Yang Menentukan Pranata Ekonomi Di Kampung Tehak Tee Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya." *Swarna* 2(8):820–26.
- Masriani, Yulies Tiena; Suryoutomo, Markus; Saryana. 2023. "Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang." *Jurnal Suara Pengabdian* 45 2(1):88–96.
- Rade, S.D ; Wohon, Ernesta Uba ; Lobo, Ferdinandus. 2023. "Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5(2):5209–15. Doi:
- Rade, S.D., Et Al. ". 2022. "Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4:1707–15.
- Sufiarina, Sufiarina, Esther Tarigan, Rina Tauran, Eni Jaya, And Elianta Ginting. 2021. "Edukasi Perlindungan Hak Milik Melalui Pendaftaran Dan Pemeliharaan Datatanah Di Rw 14 Kelurahan Tanjung Periuk." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(6):1587–92.
- Warman, Syafil, Joharsah Joharsah, And Muhlizar Muhlizar. 2022. "Pendampingan Kesadaran Hukum Dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal Di Desa Sei Rampah." *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):25–29. Doi: 10.56211/Wahana.V1i1.102.